

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, D. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dan Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2017-2021). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Sakti (Jimes)*.
- Auliyah, U., Suhairi Dan Nini, S. Y. 2020. Pengaruh Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Dan Belanja Fasilitas Umum Terhadap Keterpilihan Petahana Dalam Pemilu 2017. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Djpk.kemenkeu.go.id
- Faud, M. Ramli (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Halim, Abdul & Kusufi, M.S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik–Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Selemba Empat
- Ibrahim, S., & Digdowiseiso, K. (2023). Analisis Kinerja Anggaran Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Malang). *Jambi Unsrat (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*.
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020. *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. 30 Desember 2020. Jakarta
- Putra, W (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Rajawali Pers. Depok
- Rheswari, P. A., & Akbar, F. S. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Al-Kharaj: *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*.
- Saddiyah, P., & Valeriani, D. (2020). Komparasi Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Belanja Daerah Antar

Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Equity: Jurnal Ekonomi*.

Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara* Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32. *Keuangan Negara*. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 60. *Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*. Jakarta

